

ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN “SAWERAN UNTUK GEDUNG KPK” DI HARIAN UMUM *MEDIA INDONESIA*

Mayasari, Nani Darmayanti, Sugeng Riyanto
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Saweran untuk Gedung KPK di Harian Umum *Media Indonesia*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis model tiga dimensi Norman Fairclough. Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) Mendeskripsikan aspek kebahasaan yang digunakan dalam merepresentasikan tokoh dan topik pemberitaan, (2) Mendeskripsikan hubungan antara ideologi Harian Umum *Media Indonesia* dan aspek kebahasaan yang dihasilkan, dan (3) Mendeskripsikan situasi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi aspek kebahasaan yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kebahasaan berupa diksi, penggunaan kalimat, dan pemilihan sumber dalam kutipan langsung yang digunakan *Media Indonesia* dalam telaah, menempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kaitannya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi *Media Indonesia* yang lebih membela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, representasi selain berkaitan dengan ideologi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepentingan politik dari pemimpin institusi *Media Indonesia* yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam melakukan pencitraan positif terhadap partai yang dipimpinnya.

Kata kunci: Representasi, Analisis Wacana Kritis, Media, Politik

Bahasa merupakan media bagi manusia dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya. Namun demikian, saat ini definisi bahasa telah berkembang sesuai fungsinya bukan hanya sebagai alat berkomunikasi. Saat ini, bahasa telah menjadi media perantara dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi. Bahkan bahasa juga menyumbang proses dominasi terhadap orang lain oleh pihak lain

(Fairclough, 1989:2).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Halliday (1978:2) juga menegaskan bahwa sesungguhnya bahasa bukan hanya terdiri atas kalimat, melainkan juga terdiri atas teks atau wacana yang di dalamnya terdapat tukar-menukar maksud dalam konteks interpersonal antara satu dengan yang lain. Konteks dalam tukar menukar maksud itu tidak bersifat kosong dari nilai sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh

konteks sosial budaya masyarakatnya.

Perkembangan peran dan definisi bahasa tersebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kajian bahasa (linguistik). Linguistik tidak lagi bergerak dalam kajian struktural atau gramatikal, tetapi telah berkembang menjadi kajian-kajian yang lintas disiplin dengan bidang lain, seperti sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana, neurolinguistik, dan psikolinguistik. Kajian-kajian lintas disiplin itu menandai bahwa bahasa memang berperan besar dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

Salah satu bidang yang juga memanfaatkan bahasa dalam kaitannya dengan pelaksanaan kuasa dalam ideologi seperti yang dijelaskan di atas adalah bidang media. Sebagian besar bentuk produksi media diwujudkan dalam bentuk bahasa. Dengan demikian, hubungan antara bahasa dan media merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Richardson (2007: 6) menyatakan bahwa *"the language used in newspaper is one key site in naturalisation of inequality and neutralisation of dissent"*.

Pemanfaatan bahasa yang saat ini mendominasi media adalah penggunaan bahasa dalam wacana politik. Wacana politik banyak dihasilkan oleh media seiring dengan situasi politik Indonesia yang sangat dinamis. Salah satu pemberitaan politik yang saat ini menjadi sorotan dan publikasi media adalah pemberitaan mengenai saweran untuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberitaan saweran untuk gedung KPK ini menjadi menarik karena melibatkan berbagai institusi negara dalam polemik tersebut, khususnya antara KPK dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Kasus saweran untuk gedung KPK ini berawal dari pengajuan dana kepada DPR oleh KPK untuk pembangunan gedung baru bagi kantor KPK, karena gedung yang saat ini ditempati dinilai sudah tidak layak.

Namun, Komisi III DPR tidak mengabulkan pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK tersebut karena menurutnya Komisi III, masih layak gedung pemerintah yang dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan KPK sehingga tidak diperlukan pembangunan gedung baru.

Kasus tersebut di atas menjadi semakin menarik karena mendapat publikasi dari berbagai media massa di Indonesia, baik cetak maupun elektronik. Pemberitaan tersebut pada akhirnya baik secara langsung dan tidak langsung membawa pengaruh besar kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi terlibat dalam saweran pembangunan gedung KPK. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedagang, tukang becak, hingga menteri bergerak melakukan sumbangan saweran untuk pembangunan gedung KPK tersebut.

Salah satu media massa yang aktif melakukan pemberitaan mengenai wacana saweran untuk gedung KPK adalah Media Indonesia Group. Pemberitaan disebarakan baik melalui media cetaknya, yaitu Harian Umum *Media Indonesia (MI)* maupun melalui media elektroniknya, yaitu <http://www.mediaindonesia.com>. Luasnya media penyebaran berita diperkirakan juga membawa dampak yang lebih luas terhadap konsumsi wacana tersebut.

Kasus ini memang bukanlah kasus yang terkini yang terjadi antara KPK dengan institusi negara khususnya DPR. Meskipun demikian, kasus ini memiliki nilai sejarah yang cukup penting dalam hubungan antara KPK dan DPR, karena setelah kasus ini muncul kasus-kasus lain yang menghiasi hubungan kedua institusi negara ini. Maka dari itu, kasus saweran KPK ini dinilai sebagai pemicu dari kasus-kasus selanjutnya sehingga penting untuk dianalisis dan dikaji secara kritis.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut, (1) Aspek kebahasaan apa saja yang digunakan *Media Indonesia* untuk merepresentasikan tema dan tokoh dalam pemberitaan "Saweran untuk Gedung KPK"? (2) Apa hubungan antara ideologi Harian Umum *Media Indonesia* dan aspek kebahasaan yang dihasilkan dalam merepresentasikan institusi negara dalam pemberitaan "Saweran untuk Gedung KPK"? (3) Situasi sosial, politik, dan budaya apa yang melatarbelakangi aspek kebahasaan yang digunakan untuk merepresentasikan institusi negara dalam pemberitaan "Saweran untuk Gedung KPK" di Harian Umum *Media Indonesia*?

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoretis dan pragmatis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas tema penelitian dalam bidang bahasa, khususnya analisis wacana kritis. Melalui analisis wacana pula diharapkan penelitian-penelitian mengenai bahasa dapat lebih aplikatif dan ramah terhadap situasi dan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran kritis kepada institusi media dan pembaca media untuk lebih awas terhadap segala bentuk pemberitaan yang disalurkan melalui bahasa oleh media.

Kerangka Teori

Alwasilah (2002:120) mengungkapkan bahwa teori berfungsi untuk membangun model atau peta yang menggambarkan dunia (data) seperti apa adanya. Melalui teorilah, dunia atau fenomena dapat disederhanakan, tetapi penyederhanaan ini dilakukan untuk menjelaskan atau

menerangkan bagaimana fenomena itu bekerja. Selain itu, teori juga merupakan penuntun dalam memberikan pemahaman lebih baik terhadap objek yang diteliti dalam sebuah penelitian (Sudaryanto, 1998:6). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wacana Kritis Model Norman Fairclough (1992b, 1995a, 1998, 2000), Eriyanto (2006), Titscher (2009), Jorgensen (2007), dan Richardson (2007). Teori-teori ini digunakan karena selaras dengan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian yang mengusung bidang analisis wacana kritis ini.

Metode Penelitian

Metodologi adalah cara dalam penelitian untuk memperoleh "pengetahuan" dan "pemahaman" dari objek yang kita teliti. Metodologi dapat dilihat pada tiga tataran, yakni (1) paradigma yang digunakan (2) metode yang dipilih, dan (3) teknik yang dipakai (Hoed, 2011:7). Sementara itu, metode adalah cara yang harus dilaksanakan, teknik adalah cara melaksanakan metode dan sebagai cara, keberhasilan teknik ditentukan oleh alat yang dipakai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan memberikan deskripsi secara sistematis mengenai data, sifat-sifat, dan hubungan fenomena-fenomena yang akan diteliti (Djajasudarma, 2006: 9).

Sumber Data

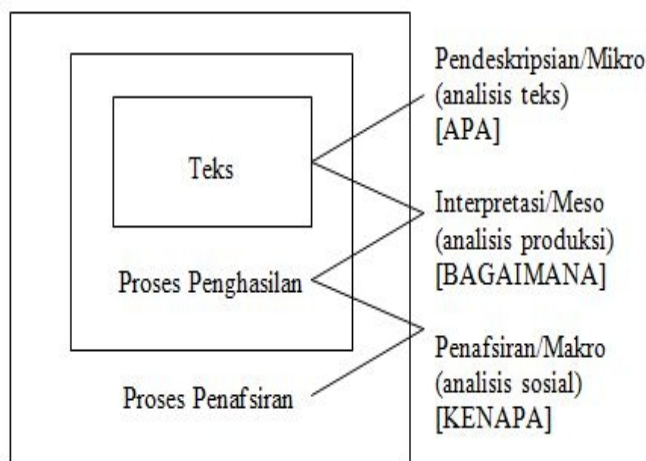
Data dalam penelitian ini merupakan data yang berjenis berita dan fitur bertema "Saweran Gedung KPK" yang hanya terdapat dalam Harian Umum *Media Indonesia* baik cetak, maupun elektronik yang diterbitkan pada waktu 26 Juni – 10 Juli 2012. Pemberitaan dalam media dicetak dipilih karena sebagai teks tertulis dinilai lebih mapan dibandingkan teks elektronik yang masih memerlukan teknik

transliterasi sebelum dianalisis. Secara keseluruhan data yang berkaitan dengan tema ini adalah ada 24 buah data. Meskipun demikian, data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya 17 buah data. Hal ini dipilih karena hanya pada ketujuhbelas data inilah dinilai memiliki muatan teks yang mengandung representasi yang penting untuk dianalisis secara kritis.

Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough

Analisis Wacana Kritis adalah sebuah upaya untuk proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) dari seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya memiliki tujuan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya dalam suatu konteks harus disadari adanya kepentingan. (Darma, 2009:49).

Kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis wacana pendekatan Norman Fairclough (1992b, 1995a; 1998; 2000) yang dikenal dengan nama analisis wacana tiga dimensi. Perhatikan Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Analisis Wacana Tiga Dimensi Fairclough (Disarikan dari Fairclough, 1992a:73; 1995a:59; 2000:313)

Yang dimaksud dengan analisis wacana tiga dimensi ini ialah analisis yang melibatkan tiga tingkat analisis: (1) analisis teks atau *textual* (mikro), yaitu pendeskripsian (*description*) mengenai teks; (2) analisis wacana atau *discourse practice* (meso), yaitu interpretasi (*interpretation*) hubungan antara proses produksi wacana dan teks; (3) analisis sosio-budaya atau *sociocultural practice* (makro), yaitu penjelasan (*explanation*) hubungan antara proses wacana dengan proses sosial (Fairclough, 1992a:73; 1995a:59; Idris, 2006:75).

Dimensi pertama yang merupakan dimensi mikro dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough ialah dimensi analisis teks. Analisis dimensi teks meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis linguistik – analisis kosa kata dan semantik, tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. Fairclough menandai pada semua itu sebagai ‘analisis linguistik’, walaupun hal itu menggunakan istilah dalam pandangan yang diperluas (Fairclough, 1995a:57; 2000:311).

Dimensi kedua yang dalam kerangka analisis wacana kritis Norman Fairclough ialah dimensi kewacanaan (*discourse practice*). Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pemrosesan wacana yang meliputi aspek penghasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Beberapa dari aspek-aspek itu memiliki karakter yang lebih institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses penggunaan dan penyebaran wacana. Berknaan dengan proses-proses institusional, Fairclough merujuk rutinitas institusi seperti prosedur-prosedur editor yang dilibatkan dalam penghasilan teks-teks media.

Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosiobudaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang

ada di luar media sesungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang ada ada dalam media. Ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri.

Fairclough (1992a:67) menyatakan bahwa praktik sosial memiliki berbagai orientasi, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi, dan sebagainya, dan wacana merupakan gambaran dari semua masalah tersebut. Dengan demikian, analisis dimensi praktik sosial merujuk kepada usaha menjelaskan persoalan yang berkaitan orientasi seperti di atas, seperti berkaitan nilai, kepercayaan, ideologi, filosofi, budaya, dan lain-lain yang terdapat di dalam wacana (Idris, 2006:81).

Penggunaan aspek kebahasaan dalam penelitian ini merujuk kepada analisis teks atau didefinisikan sebagai suatu bentuk pemanfaatan aspek-aspek bahasa, dari aspek morfologis, sintaksis, dan konteks dalam pemberitaan kasus saweran gedung KPK. Dengan kata lain, ekspresi kebahasaan juga dapat didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan alat-alat bahasa diekspresikan atau digunakan dalam pemberitaan kasus tersebut di atas.

Sementara itu istilah representasi dalam penelitian ini menunjuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Representasi atau misrepresentasi tersebut adalah peristiwa kebahasaan. Bagaimana seseorang ditampilkan, dapat terjadi pertama-tama dengan menggunakan bahasa. Melalui bahasalah berbagai tindak representasi ini ditampilkan oleh media dan dihadirkan dalam pemberitaan. Oleh karena itu, pemakaian bahasalah yang perlu dikritisi dalam pemberitaan yang dilakukan oleh media (Eriyanto 2006:116).

Analisis Mikro Pemberitaan "Saweran untuk Gedung KPK"

Dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan media Indonesia dalam pemberitaan "Saweran untuk Gedung KPK", terdapat tiga alat yang menandai representasi tema dan tokoh yang terlibat dalam pemberitaan tersebut di atas. Yaitu melalui diksi, penggunaan kalimat luas sebab akibat, dan pemilihan sumber dalam kutipan langsung. Penggunaan diksi aksi saweran yang lebih mendominasi dibandingkan dengan diksi sumbangan telah menandai bahwa *Media Indonesia* lebih menempatkan tindakan pengumpulan dana untuk pembangunan gedung KPK tersebut sebagai suatu "gerakan massa" yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, pemanfaatan kalimat luas dengan konstruksi sebab akibat telah menempatkan DPR dalam representasi yang negatif karena diposisikan sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya aksi gerakan tersebut. Demikian pula halnya pemilihan nara-sumber pada kutipan langsung, *Media Indonesia* lebih dominan menyuarakan pendapat dari pihak yang berpihak kepada KPK daripada menyuarakan pendapat yang memihak kepada DPR. Hal ini menempatkan KPK pada representasi yang positif dan DPR pada representasi yang negatif. Di bawah ini adalah analisis dari aspek kebahasaan tersebut.

- (1) Aksi saweran gedung KPK yang dimulai 27 Juni lalu, hingga saat ini mencapai sekitar Rp 200 juta. (*MI*, 9 Juli 2012).
- (2) Ide menggalang dana publik teretus karena Komisi III DPR belum menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK meski telah diminta sejak 2008. (*MI*, 27 Juni 2012).
- (3) Sumbangan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pembangunan gedung baru terus mengalir. (*MI*, 21 Juni 2012).

- (4) *Penggalangan dana* untuk membangun gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah. (MI, 23 Juni 2012).

Contoh data (1) – (4) menandai bahwa untuk kasus dalam konteks yang sama, *Media Indonesia* memilih diksi yang bermacam-macam, yaitu diksi *aksi saweran*, *ide menggalang dana publik*, *sumbangan masyarakat*, dan *penggalangan dana*. Keempat diksi tersebut memiliki makna semantik yang berlainan pula. Secara semantik leksikal, makna kata *sumbangan masyarakat* yang berarti ‘pemberian sebagai bantuan dari masyarakat’ memiliki makna yang lebih netral dibandingkan *aksi saweran* dan *penggalangan* yang memiliki makna ‘gerakan mengumpulkan dana dari masyarakat’.

- (5) *Gara-gara DPR menolak* rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pimpinan KPK sudah sepakat untuk ikut saweran untuk rencana pembangunan gedung KPK. (MI, 29 Juni 2012).
- (6) *Ide menggalang dana publik tercetus karena* Komisi II DPR belum *menyetujui* anggaran pembangunan gedung baru KPK meski telah diminta sejak 2008. (MI, 27 Juni 2012).
- (7) Komisi III DPR *bersikukuh* keberatan untuk mengabulkan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DPR masih mendorong kepada KPK untuk memakai gedung pemerintah yang kosong.

Sementara itu, contoh data (5), (6), dan (7) merupakan contoh data pemanfaatan strategi linguistik yang berupa struktur kalimat. Kalimat luas pada data (5) di atas memiliki hubungan sebab-akibat yang ditandai dengan konjungsi *gara-gara* di awal kalimat karena anak kalimat mendahului induk kalimat. Sementara itu, data (6) memiliki hubungan akibat-sebab

yang ditandai dengan konjungsi *karena* setelah induk kalimat. Strategi yang senantiasa membandingkan KPK dan DPR dalam konstruksi kalimat sebab akibat seperti ini menempatkan DPR sebagai penyebab polemik yang terjadi dan menempatkan KPK sebagai korban dan dirugikan atas polemik tersebut.

Selain aspek kebahasaan secara struktural atau gramatikal, yang tidak kalah menariknya adalah cara *Media Indonesia* menyuarakan inspirasinya melalui kutipan langsung para tokoh yang menjadi narasumber. Berdasarkan data yang ada, secara kutipan langsung dapat diketahui bahwa *Media Indonesia* lebih menyuarakan pihak yang mendukung KPK dibandingkan mendukung DPR. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data berikut yang berupa beberapa contoh data berupa tentang kutipan langsung mengenai issue pemberitaan Saweran untuk Pembangunan Gedung KPK.

- (8) “Maksud dan tujuan JCW membuka posko ini adalah sebagai bentuk keprihatinan JCW karena gedung KPK harus segera diadakan.” 1.4.7 (JCW-Ketua Jogja Corruption Watch).
- (9) “Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya selama enam bulan untuk pembangunan gedung KPK,” ujar Dahlan Iskan. 2.3.5 (Dahlan Iskan – Menteri Badan Usaha Milik Negara)
- (10) “Kalau KPK membutuhkan kita harus dukung,” kata Prabowo saat ditemui usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan.4.2.3 (Prabowo – Partai Gerindra)
- (11) “Saya dukung pembangunan gedung KPK” 6.6.9 (Effendi Choirie, Anggota Komisi I DPR PKB).
- (12) “Sebagai orang awam, aku hanya ingin Indonesia tanpa korupsi.”6.10.10 (Charlie Van Houten – Mantan Vokalis ST 12)

- (13) "Kami hanya ingin membantu KPK. Ini bukan kehendak KPK, tapi kehendak rakyat. Buruh sangat geram kepada DPR RI yang tidak menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK." 7.4.5 (Soeharno – Ketua PBSI)
- (14) "Jadi silakan saja jika publik, termasuk PKL (pedagang kaki lima), ingin menyumbang pembangunan gedung KPK." 8.6.7 (Mahfud MD – Ketua MK)
- (15) "Saya terharu mendengar KPK mau membuat gedung baru tapi anggarannya masih terkendala di DPR." 10.3.5 (Darjo – Warga)
- (16) "Itu membuktikan dukungan besar masyarakat kepada KPK yang selama ini dinilai paling berhasil mengungkap kasus korupsi." 11.3.3 (Taufikurrahman Syaury – Anggota Komisi Yudisial)
- (17) "Ini jangan dibiarkan, jelas-jelas melanggar undang-undang (UU) dan kalau dibiarkan, nanti juga aparat atau pejabat akan melakukan hal yang sama. Kenapa pihak kepolisian membiarkan hal tersebut." 12.2.3 (Indra Sahnun Lubis – Ketua Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI))
- (18) "Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak memberantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkatkan kinerja. Tapi kan tidak diberi oleh DPR." 13.4.4 (Rizky – Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
- (19) "Kami hanya memberi catatan kecil, coba usahakan gedung-gedung yang sudah ada," papar anggota Komisi III DPR dari F-PPP Ahmad Yani di Komplek Kepatihan Kantor Gubernur DI Yogyakarta." 14.2.3 (Ahmad Yani – Anggota Komisi III)

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa *Media Indonesia* memilih narasumber yang lebih memihak kepada KPK dalam pemberitaannya, yaitu Ketua

Jogja Corruption Watch, Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Jumakir (pengemudi becak), Prabowo (Dewan Pembina Partai Gerindra), Effendi Choirie (Anggota Komisi I DPR PKB), Charly Van Houten (Mantan Vokalis ST 12), Suharno (Ketua SBSI), Mahfud M.D. (Ketua M.K.), Darjo (warga), Taufiqurrohmah (Anggota Komisi Yudisial), dan Rizky (Ikatan Pelajar Muhammadiyah). Sementara itu, narasumber yang memihak kepada DPR hanyalah dari Indra Syahnun Lubis (Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI)) dan Ahmad Yani (Anggota Komisi III DPR).

Isi wacana yang disampaikan melalui kutipan langsung tersebut juga sangat mengeksplisitkan dukungannya terhadap KPK dibandingkan terhadap DPR seperti kutipan sebagai berikut. "*Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya selama enam bulan untuk pembangunan gedung KPK,*" ujar Dahlan Iskan. (2.3.5) "*Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak memberantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkatkan kinerja. Tapi kan tidak diberi oleh DPR*" (13.4.4). "*Kami hanya ingin membantu KPK. Ini bukan kehendak KPK, tapi kehendak rakyat. Buruh sangat geram kepada DPR RI yang tidak menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK.*" (7.4.5).

Analisis Meso Pemberitaan "Saweran untuk Gedung KPK"

Media Indonesia terbit pertama kali pada tanggal 19 Januari 1970 sebagai koran dengan jangkauan nasional dimana koran *Media Indonesia* dapat diperoleh di 33 propinsi yang tersebar di 429 kabupaten / kotamadya di seluruh Indonesia. Direktur Utama *Media Indonesia* adalah Surya Paloh dan Teuku Yousli Syah sebagai Pimpinan Redaksi.

Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Mark Plus Insight menempatkan *Media Indonesia* pada urutan ke-3 besar

(12.22%) sebagai koran yang dibaca para eksekutif untuk mengakses berita ekonomi dan bisnis. Readership Profile Media Indonesia adalah: 63% pria dan 37% wanita, Usia produktif 20-49 tahun (87%), Social Economic Status A1-A2-B Class (76%), Mayoritas pekerjaan White collars (44%), Psikografis pembaca Media Indonesia adalah *western minded, optimist dan juga settled* (Sumber: *Media Indonesia online*).

Visi yang diemban Harian Umum *Media Indonesia* adalah menjadi surat kabar independen yang inovatif, lugas, terpercaya dan paling berpengaruh. Independen artinya adalah menjaga sikap non-partisan, dimana karyawannya tidak menjadi pengurus partai politik, menolak segala bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi objektivitas, dan mempunyai keberanian untuk bersikap beda. Inovatif berarti terus-menerus menyempurnakan serta mengembangkan SDM (sumber daya manusia), serta secara terus-menerus mengembangkan rubrik, halaman, dan penyempurnaan perwajahan. Lugus berarti selalu melakukan *check* dan *re-check*, meliput berita dari dua pihak dan seimbang, serta selalu melakukan investigasi dan pendalaman. Berpengaruh berarti dengan target bahwa *Media Indonesia* dibaca oleh para pengambil keputusan, memiliki kualitas editorial yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, mampu membangun kemampuan antisipatif, mampu membangun *network* narasumber dan memiliki pemasaran/distribusi yang andal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai media terbesar ketiga, *Media Indonesia* merupakan harian umum yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indonesia dengan cukup luas. Rangkaian produksi teks di *Media Indonesia* juga bukan hanya merupakan rangkaian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian institusional yang melibatkan wartawan, redaksi, editor, bahkan pemilik

modal, dll. Realisasi teks yang dihasilkan *Media Indonesia* khususnya dalam hal pemberitaan Saweran Gedung KPK ini juga dinilai selaras dengan visi yang diemban yaitu, inovatif, lugas, terpercaya dan paling berpengaruh, meskipun di dalamnya terkandung pencitraan yang negatif terhadap pihak tertentu.

Analisis Makro Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Situasi sosial politik yang terjadi saat pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” ini juga tidak dapat dilepaskan konteks yang membangun pemberitaan tersebut. Dapat diketahui bersama bahwa sepanjang tahun 2011-2012 terjadi berbagai konflik terbuka antara KPK dan DPR, mulai dari kasus berkaitan dengan Badan Anggaran DPR, tentang Undang-Undang KPK, hingga tentang Saweran Gedung KPK. Seluruh peristiwa tersebut mendapat liputan yang luas dari berbagai media yang ada di Indonesia termasuk *Media Indonesia*.

Selain hal tersebut di atas, situasi politik dalam kaitannya dengan pemberitaan di atas adalah bahwa pada saat pemberitaan berlangsung, situasi politik Indonesia sedang menghangat menjelang Pemilihan Umum tahun 2014 di mana Direktur Utama *Media Indonesia*, Surya Paloh, juga menjadi pendiri partai sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini merupakan satu-satunya partai baru yang lolos untuk mengikuti Pemilu 2014. Dengan mengusung moto Gerakan Perubahan, partai Nasdem selalu menyuarakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dan terbebas dari korupsi, kemiskinan, dan disintegrasi.

Meski tidak berkaitan secara langsung, tetapi dapat ditarik benang merah atas pemberitaan yang dihasilkan oleh *Media Indonesia*, erat kaitannya dengan pengaruh Surya Paloh selaku Direktur Utama *Media*

Indonesia dan juga selaku Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Ada motivasi tertentu melalui pencitraan negatif dalam pemberitaan tentang KPK dan DPR. Opini pembaca digiring untuk memberikan pencitraan negatif pada para anggota DPR sekaligus partai yang ada. Dengan demikian diperlukan suatu gerakan perubahan melalui partai baru yang diusung oleh Surya Paloh yang secara tidak langsung memberikan pencitraan positif bagi partai yang dipimpinnya.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kebahasaan diksi, penggunaan kalimat, dan pemilihan sumber dalam kutipan langsung yang digunakan *Media Indonesia* dalam telah menempatkan tema pemberitaan sebagai sebuah gerakan masyarakat, selain itu aspek kebahasaan juga telah menempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kaitannya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi *Media Indonesia* yang lebih membela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, representasi selain berkaitan dengan ideologi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepentingan politik dari pemimpin institusi *Media Indonesia* yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam melakukan pencitraan positif terhadap partai yang dipimpinnya.

DAFTAR RUJUKAN

Alwasilah, Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.

Djasudarma, T. Fatimah. 2006. *Metode Linguistik: Ancangan Metode*

Penelitian dan Kajian. Bandung: PT Eresco.

Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: LKIS.

Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1992a. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1992b. *Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis*. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1995a. *Media Discourse*. London: Edward Arnold.

Fairclough, Norman. 1995b. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1998. "Political Discourse in The Media: An Analytical Framework", dalam Allan Bell and Peter Garret (editor). *Approaches to Media*, hlm. 142–162. Massachusetts: Blackwell Publisher Inc.

Fairclough, Norman. 2000. "Critical Analysis of Media Discourse", dalam Paul Marris and Sue Thornham (editor). *Media Studies a Reader*, hlm. 308–328. Washington New York University Press.

Halliday, M. A. K. 1978. *Language as Social Semiotic*. London: Edward Arnold.

Hoed, Benny H. 2011. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Idris Aman. 2006. *Bahasa dan Kepemimpinan Analisis Wacana Mahathir Mohammad*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jorgensen, Mariane W. 2007. "Analisis Wacana: Teori dan Metode", dalam

Abdul Syukur Ibrahim (Ed.).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Richardson. 2007. *Analysing Newspaper: An Approach from Critical Discourse Analysis*. England: Palgrave Macmillan.

Sudaryanto. 1993. *Metode dan Teknik Penelitian Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana.

Titscher, Stefan dkk. 2009. "Metode Analisis Teks dan Wacana", dalam Abdul Syukur Ibrahim (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.